

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian untuk penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan analisis pertumbuhan aset, rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang pada pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Tahun 2017-2019 maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- 1) Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan hasil analisis pertumbuhan aset periode 2017-2018 menunjukkan sinyal negatif karena adanya penurunan nilai aset dan periode 2018-2019 menunjukkan sinyal positif karena adanya kenaikan pertumbuhan nilai aset dari tahun sebelumnya.
- 2) Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas dapat dikatakan likuid karena pemerintah mempunyai kemampuan melunasi kewajiban jangka pendeknya.
- 3) Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan hasil analisis rasio solvabilitas dapat dikatakan solvabel, dimana pemerintah dapat melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
- 4) Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan hasil analisis rasio utang dapat dikatakan ada peningkatan resiko bagi kreditur dalam memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah Timor Tengah Utara dikarenakan nilai rasio utang yang naik pada periode 2018-2019.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Analisis pertumbuhan aset Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2017-2018 menunjukkan sinyal negatif, hal ini disebabkan adanya penurunan nilai aset. Keadaan seperti ini harus diperbaiki dengan meningkatkan kembali nilai dari pada aset yang ada, agar pertumbuhan aset dari Kabupaten Timor Tengah Utara bisa menunjukkan sinyal yang positif.
2. Rasio solvabilitas dan rasio likuiditas pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara dalam keadaan baik, untuk meningkatkan lagi pemerintah harus memperbesar aset dan modal pemerintah dari kewajiban agar pemerintah dapat melunasi kewajiban yang ada.
3. Rasio utang pemerintah daerah Timor Tengah Utara menunjukkan ada resiko bagi kreditur untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah harus menurunkan nilai rasio utang yang ada walaupun nilai rasio utang terhadap ekuitas tidak menunjukkan pemerintah sudah kelebihan utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Dahri Adi Patra Ls. SE., M. Si dan Dr. Drs. Suhardi M. Anwar, MM. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Diponegoro.
- Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Timor Tengah Utara
- Diana Mandasari, Skripsi Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada CV. Awijaya Palembang
- Dr. Dwi Ratmono, M.Si., Ak., CA dan Mahfud Sholihin, Ph. D, Ak. CA. 2017. *Akuntansi Keuangan daerah Berbasis Akrual*, Edisi Kedua, Yogyakarta.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan daerah.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BFFE
- Muhammad Amri, *Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Incipna Indonesia*
- Mahmudi (2016) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Ketiga, Yogyakarta.
- Puji Ulfatin, Skripsi Analisis Kewajiban Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2011-2016
- Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2020 tentang Standar akuntansi Pemerintahan.
- Rahayu Kusuma Dewi, Skripsi Analisis Aset Pemerintah Daerah Kota Bandung
- S. Munawir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta
- Siaran Pers BPK Perwakilan Provinsi NTT
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.

Virgasari, Aviva. 2009. Hubungan Antara Opini Auditor pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.